

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESTINASI WISATA KEPULAUAN SERIBU DKI JAKATA**

**T. HERRY RACHMATSYAH**

Universitas Prof. Dr. Moestopo (beragama)  
E-mail/korespondensi: herry.rachmatsyah@dsn.moestopo.ac.id

**Abstract:**

*The Thousand Islands tourist destination as one of the main natural tourist destinations for tourists faces several problems that have a negative impact on its sustainability in the future. These problems include limited clean water, population density, lack of burial grounds, limited number of docks, and the amount of garbage. These problems should not occur considering that in 2016, the Indonesian government through the Ministry of Tourism issued a policy in the form of the Minister of Tourism Regulation No. 14 of 2016 concerning Guidelines for Sustainable Tourism Destinations which contain criteria that have adopted international standards for sustainable tourism from the Global Sustainable Tourism Council (GSTC). This study wanted to find out which criteria for sustainable tourism have and have not been implemented in the Thousand Islands tourist destinations. Data were collected through observations, document reviews, questionnaires, and interviews with respondents consisting of 51 tourism managers located on residential islands, cultural heritage islands, and resort islands in the Thousand Islands. The collected data were then analyzed using quantitative and qualitative descriptive analysis techniques. The results of this study concluded that not all implementations of sustainable tourism indicators meet the standards.*

**Keywords:** policy implementation, sustainable tourism

**Abstrak:**

Destinasi wisata Kepulauan Seribu sebagai salah satu destinasi wisata alam utama bagi para wisatawan menghadapi beberapa masalah yang berdampak buruk bagi keberlanjutannya di masa depan. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah keterbatasan air bersih, kepadatan penduduk, kurangnya lahan pemakaman, keterbatasan jumlah dermaga, dan banyaknya sampah. Masalah-masalah ini seharusnya tidak terjadi mengingat pada tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang berisi kriteria-kriteria yang sudah mengadopsi standar internasional pariwisata berkelanjutan dari *Global Sustainable Tourism Council (GSTC)*. Penelitian ini ingin mengetahui kriteria-kriteria standar pariwisata berkelanjutan mana saja yang sudah dan belum diimplementasikan di destinasi wisata Kepulauan Seribu. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan dokumen, kuesioner, dan wawancara dengan responden yang terdiri dari 51 orang pengelola wisata yang berlokasi di pulau hunian, pulau cagar budaya, dan pulau resor yang ada di Kepulauan Seribu. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum semua implementasi indikator pariwisata berkelanjutan memenuhi standar.

**Kata Kunci:** implementasi kebijakan, pariwisata berkelanjutan

### **PENDAHULUAN**

Kepulauan Seribu di DKI Jakarta sudah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam tidak hanya oleh wisatawan lokal tetapi

juga wisatawan yang berasal luar negeri. Akses yang tidak terlalu jauh dari Jakarta membuat Kepulauan Seribu ramai dikunjungi wisatawan dan jumlahnya semakin meningkat

dari waktu ke waktu. Namun demikian Kepulauan Seribu mengalami beberapa masalah yang dikhawatirkan bisa berdampak buruk bagi keberlanjutannya sebagai destinasi wisata alam (tempo.co, 2012). Masalah pertama adalah keterbatasan air bersih. Persediaan air bersih tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan wisatawan yang ada sehingga sering terjadi kelangkaan terutama ketika musim kemarau. Masalah kedua adalah kepadatan penduduk. Dari 110 pulau yang ada di Kepulauan Seribu, 11 di antaranya merupakan pulau hunian (Payung, Tidung, Lancang, Pari, Untung Jawa, Panggang, Pramuka, Kelapa, Kelapa Dua, Harapan, dan Sebira). Jumlah penduduk di pulau hunian semakin meningkat, bahkan di Pulau Pramuka karena sudah sangat padat ada sebagian masyarakat yang membangun hunian di atas laut. Masalah ketiga adalah kurangnya lahan pemakaman. Jumlah penduduk yang semakin banyak menyebabkan lahan yang tersisa akhirnya digunakan untuk membangun hunian dan hampir tidak tersedia lahan untuk pemakaman sejak beberapa tahun terakhir.

Masalah keempat adalah keterbatasan jumlah dermaga. Untuk menuju ke Kepulauan Seribu, wisatawan perlu menyeberang menggunakan kapal dari dermaga Marina Ancol, Muara Angke, dan Kali Adem. Kapasitas dermaga yang terutama Muara Angke, sudah tidak memadai karena banyaknya orang yang hendak menyeberang melalui dermaga tersebut. Masalah yang keempat adalah banyaknya sampah. Banyaknya sampah yang berasal dari

pulau, lautan, dan kiriman dari Jakarta mulai menjadi sorotan wisatawan yang sedang berada di Kepulauan Seribu dan dikhawatirkan bisa menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung (kompas.id, 2019).

Masalah-masalah tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat pada tahun 2016, keluar kebijakan berupa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kebijakan tersebut mengadopsi standar internasional pariwisata berkelanjutan dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC). Berdasarkan kebijakan tersebut pariwisata berkelanjutan dibagi dalam empat kriteria yaitu : 1) pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, 2) pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, 3) pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan 4) pelestarian lingkungan.

Istilah pariwisata berkelanjutan merupakan pengembangan dari istilah yang lebih luas yaitu pembangunan berkelanjutan. Istilah pembangunan berkelanjutan dipopulerkan oleh *World Commission on Environment and Development* pada akhir 1980-an. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri" (WCED, 1987). Menurut Eber (1992), pembangunan berkelanjutan "menganjurkan penggunaan bijak dan konservasi sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan

jangka panjang". Gagasan pembangunan berkelanjutan kemudian dicoba diterapkan di sektor pariwisata yaitu "pengembangan pariwisata yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau pariwisata yang dengan bijak menggunakan dan melestarikan sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan jangka panjangnya" (Weaver, 2006).

Penelitian mengenai pariwisata berkelanjutan sebenarnya sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Penelitian yang dilakukan Sitepu (2019) mengenai model pengembangan pariwisata berkelanjutan di Taman Simalem Resort, Danau Toba menyimpulkan bahwa " salah satu indikator penting tata kelola pariwisata yang baik adalah ketika destinasi sudah menjalankan manajemen dan pengembangan pariwisata dengan prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan yaitu 1) menunjukkan manajemen berkelanjutan yang efektif, 2) memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal dan meminimalkan dampak negatif, 3) memaksimalkan manfaat bagi warisan budaya dan meminimalkan dampak negatif, dan 4) memaksimalkan manfaat bagi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif". Penelitian yang dilakukan oleh Arief, Famiola, Roestan, dan Zakaria (2019) mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui program CSR di Ciletuh Global Geopark Pelabuhanratu menyimpulkan bahwa "penerapan

model bisnis melalui program CSR akan memungkinkan diseminasi solusi dan teknologi yang lebih efisien dan efektif dalam industri untuk menghasilkan lebih banyak manfaat bagi pelanggan dan perusahaan dan menciptakan nilai tambah yang lebih besar di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan".

Semua penelitian tersebut umumnya mengkaji aspek-aspek tertentu yang bersifat khusus dari penerapan pariwisata berkelanjutan. Sejauh ini belum ada penelitian mengenai pariwisata berkelanjutan yang menyoroti hal tersebut sebagai sebuah kebijakan yang implementasinya harus dievaluasi menggunakan kriteria dan indikator yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Chakrabarty dan Chand (2012) menyatakan bahwa "implementasi adalah tugas menempatkan kebijakan yang dirumuskan untuk dipraktikkan. Implementasi mewakili perubahan sadar dari rencana kebijakan menjadi kenyataan". Penelitian ini ingin mengetahui indikator-indikator standar pariwisata berkelanjutan mana saja yang sudah dan belum diimplementasikan di destinasi wisata Kepulauan Seribu. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah "bagaimana kesesuaian implementasi pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu dengan kriteria-kriteria yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan?" Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kesesuaian

implementasi pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu dengan kriteria-kriteria yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini bersifat deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan fenomena yang menjadi obyek penelitian. Kepulauan Seribu dipilih sebagai lokasi penelitian karena destinasi ini merupakan destinasi wisata alam utamal di DKI Jakarta dengan jumlah kunjungan wisatawan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan dokumen, kuesioner dan wawancara dengan 51 orang responden yang terdiri dari 11 pengelola wisata pulau hunian, 4 pengelola wisata pulau cagar budaya, 6 pengelola wisata pulau resor. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, digunakan skoring untuk mengukur tingkat implementasi. Responden diminta memberikan nilai terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner menggunakan kriteria

tidak sesuai, kurang sesuai, sesuai, dan sangat sesuai. Tidak sesuai diberi nilai persepsi 1, kurang sesuai diberi nilai persepsi 2, sesuai diberi nilai persepsi 3, dan sangat sesuai diberi nilai persepsi 4. Indikator-indikator yang dinilai adalah pemenuhan kriteria sebagaimana yang terdapat dalam Bab II Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yaitu pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, dan pelestarian lingkungan. Wawancara dilakukan terhadap hasil penilaian yang diberikan responden. Analisis kualitatif digunakan lebih lanjut untuk memahami dan menjelaskan hasil analisis kuantitatif.

## **HASIL PENELITIAN**

Untuk mengetahui implementasi pariwisata berkelanjutan di Kepulauan Seribu, pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan kriteria-kriteria sebagaimana yang terdapat dalam Bab III Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

**Tabel 1**  
**Pemenuhan Kriteria Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan**

No.	Indikator	Implementasi							
		Tidak Sesuai	%	Kurang Sesuai	%	Sesuai	%	Sangat Sesuai	%
1	Strategi destinasi berkelanjutan	0	0	45	88,23	6	11,76	0	0
2	Organisasi manajemen destinasi	0	0	0	0	48	94,12	3	5,88
3	<i>Monitoring</i>	36	70,59	8	15,67	7	13,72		0

4	Pengelolaan pariwisata musiman	0	0	0	0	44	86,27	7	13,72
5	Adaptasi terhadap perubahan iklim	8	15,69	41	80,39	2	3,92	0	0
6	Inventarisasi aset dan atraksi pariwisata	7	13,72	46	90,20	0	0	0	0
7	Pengaturan perencanaan	0	0	40	78,43	11	21,57	0	0
8	Akses untuk semua	39	76,47	12	23,53	0	0	0	0
9	Akuisisi properti	0	0	7	13,72	44	86,27	0	0
10	Kepuasan pengunjung	0	0	8	15,69	38	74,51	5	9,80
11	Standar keberlanjutan	24	47,06	26	50,98	1	1,96	0	0
12	Keselamatan dan keamanan	0	0	2	3,92	48	94,12	1	1,96
13	Manajemen krisis dan kedaruratan	49	96,08	2	3,92	0	0	0	0
14	Promosi	0	0	1	1,96	34	66,67	16	31,37
Total		163	22,83	238	33,33	283	39,64	32	4,48

Tabel 1 menunjukkan bahwa pemenuhan kriteria pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan dinilai kurang sesuai secara keseluruhan di mana nilai persepsi tidak sesuai dan kurang sesuai (22,83% dan 33,33% atau 56,16%) lebih besar dibandingkan nilai persepsi sesuai dan sangat sesuai (39,64% dan 4,48% atau 43,84%). Indikator-indikator yang dinilai sudah sesuai terdiri dari organisasi

manajemen destinasi, pengelolaan pariwisata musiman, akuisisi properti, kepuasan pengunjung, keselamatan dan keamanan, dan promosi sedangkan yang belum sesuai terdiri dari strategi destinasi berkelanjutan, *monitoring*, adaptasi terhadap perubahan iklim, inventarisasi aset dan atraksi pariwisata, standar keberlanjutan, dan manajemen krisis dan kedaruratan.

**Tabel 2**  
**Pemenuhan Kriteria Pemanfaatan Ekonomi untuk Masyarakat Lokal**

No.	Indikator	Implementasi							
		Tidak Sesuai	%	Kurang Sesuai	%	Sesuai	%	Sangat Sesuai	%
1	Pemantauan ekonomi	0	0	0	0	31	60,78	20	39,22
2	Peluang kerja untuk masyarakat lokal	0	0	0	0	23	45,10	28	54,90
3	Partisipasi masyarakat	0	0	0	0	29	56,86	22	43,13
4	Opini masyarakat lokal	0	0	0	0	39	76,47	12	23,53
5	Akses bagi masyarakat lokal	0	0	11	21,57	40	78,43	0	0
6	Fungsi edukasi sadar wisata	0	0	8	15,69	41	80,39	2	3,92
7	Pencegahan eksplorasi	0	0	0	0	30	58,82	21	41,18
8	Dukungan untuk masyarakat	0	0	0	0	34	66,67	17	33,33

9	Mendukung usaha lokal dan perdagangan yang adil	0	0	0	0	15	29,41	36	70,59
	Total	0	0	19	4,14	282	61,44	158	34,42

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemenuhan kriteria pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal dapat dinilai sudah sesuai secara keseluruhan di mana nilai persepsi tidak sesuai dan kurang sesuai (0% dan 41,39% atau 41,39%) lebih kecil dibandingkan nilai persepsi sesuai dan sangat sesuai (61,44% dan 34,42% atau 95,86%). Indikator-indikator yang dinilai sudah sesuai

terdiri dari pemantauan ekonomi, peluang kerja untuk masyarakat lokal, partisipasi masyarakat, opini masyarakat lokal, akses bagi masyarakat lokal, fungsi edukasi sadar wisata, pencegahan eksploitasi, dukungan untuk masyarakat, mendukung usaha lokal dan perdagangan yang adil sedangkan yang belum sesuai tidak ada.

**Tabel 3**  
**Pemenuhan Kriteria Pelestarian Budaya bagi Masyarakat dan Pengunjung**

No.	Indikator	Implementasi							
		Tidak Sesuai	%	Kurang Sesuai	%	Sesuai	%	Sangat Sesuai	%
1	Perlindungan atraksi wisata	0	0	0	0	47	92,16	4	7,84
2	Pengelolaan pengunjung	0	0	0	0	38	74,51	13	25,49
3	Perilaku pengunjung	0	0	0	0	31	60,78	20	39,22
4	Perlindungan warisan budaya	0	0	28	54,90	23	45,10	0	0
5	Interpretasi tapak	0	0	0	0	43	84,31	8	15,69
6	Perlindungan kekayaan intelektual	0	0	31	60,78	20	39,22	0	0
	Total	0	0	59	19,28	202	66,01	45	14,71

Tabel 3 menunjukkan bahwa pemenuhan kriteria pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung dapat dinilai sudah sesuai secara keseluruhan di mana nilai persepsi tidak sesuai dan kurang sesuai (0% dan 19,28% atau 19,28%) lebih kecil dibandingkan nilai persepsi sesuai dan sangat sesuai (66,01% dan 14,71 atau

80,72%). Indikator-indikator yang dinilai sudah sesuai terdiri dari perlindungan atraksi wisata, pengelolaan pengunjung, perilaku pengunjung, dan interpretasi tapak sedangkan yang belum sesuai terdiri dari perlindungan warisan budaya dan perlindungan kekayaan intelektual.

**Tabel 4**  
Pemenuhan Kriteria Pelestarian Lingkungan

No.	Indikator	Implementasi							
		Tidak Sesuai	%	Kurang Sesuai	%	Sesuai	%	Sangat Sesuai	%
1	Risiko lingkungan	4	7,84	26	50,98	21	0,41,18	0	0
2	Perlindungan lingkungan sensitif	9	17,65	25	49,02	17	33,33	0	0
3	Perlindungan alam liar (flora dan fauna)	0	0	11	21,57	40	78,43	0	0
4	Emisi gas rumah kaca	0	0	6	11,76	42	82,35	3	5,88
5	Konservasi energi	28	54,90	21	41,18	2	3,92	0	0
6	Pengelolaan air	0	0	47	92,16	4	7,84	0	0
7	Keamanan air	0	0	45	88,23	6	11,76	0	0
8	Kualitas air	0	0	43	84,31	8	15,69	0	0
9	Limbah cair	0	0	46	90,20	5	9,80	0	0
10	Mengurangi limbah padat	0	0	40	78,43	11	21,57	0	0
11	Polusi cahaya dan suara	0	0	0	0	32	62,74	19	37,25
12	Transportasi ramah lingkungan	0	0	0	0	9	17,65	42	82,35
<b>Total</b>		<b>41</b>	<b>6,70</b>	<b>310</b>	<b>50,65</b>	<b>197</b>	<b>32,19</b>	<b>64</b>	<b>10,46</b>

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemenuhan kriteria pelestarian lingkungan dapat dinilai belum sesuai secara keseluruhan di mana nilai persepsi tidak sesuai dan kurang sesuai (6,70% dan 50,65% atau 57,35%) lebih kecil dibandingkan nilai persepsi sesuai dan sangat sesuai (32,19% dan 10,46% atau 42,65%). Indikator-indikator yang dinilai sudah sesuai terdiri dari perlindungan alam liar (flora dan fauna), emisi gas rumah kaca, polusi cahaya dan suara, dan transportasi ramah lingkungan sedangkan yang belum sesuai terdiri dari risiko lingkungan, perlindungan lingkungan sensitif, konservasi energi, pengelolaan air, keamanan air, kualitas air, limbah cair, dan mengurangi limbah padat.

## **PEMBAHASAN**

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara umum Kepulauan Seribu belum melakukan implementasi sesuai kriteria pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan seperti yang terdapat dalam Bab III Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kepulauan Seribu sudah memiliki strategi pariwisata untuk jangka pendek, menengah, dan panjang tetapi belum melibatkan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan yang relevan. Kepulauan Seribu sudah memiliki organisasi manajemen destinasi yang berada di bawah kendali pemerintah daerah tetapi kurang terkoordinasi dan belum memiliki pembagian tugas yang jelas. Sistem *monitoring* dan evaluasi sudah ada

tetapi belum memiliki prosedur mitigasi yang jelas. Kepulauan Seribu memiliki kalender wisata tahunan sehingga memudahkan wisatawan menentukan waktu kunjungan. Kepulauan Seribu sudah memiliki program adaptasi perubahan iklim tetapi belum disosialisasikan dengan baik ke masyarakat dan pengelola wisata. Kepulauan Seribu sudah melakukan inventarisasi aset dan atraksi pariwisata tetapi daftarnya belum diperbarui setiap tahun. Kebijakan sumberdaya alam dan budaya sudah ada tetapi penegakan hukumnya belum dilakukan secara tegas. Kebijakan akses untuk semua sudah ada tetapi belum semua pengelola wisata memiliki fasilitas khusus untuk penyandang catat dan orang dengan kebutuhan khusus. Akuisisi properti di Kepulauan Seribu tidak selalu sesuai dengan hukum ada yang bisa berdampak kurang menguntungkan dari segi kompensasi bagi pemilik properti yang diakuisisi. Sistem *monitoring* kepuasan pengunjung sudah ada tetapi hasilnya belum selalu ditindaklanjuti. Standar keberlanjutan melalui sertifikasi sudah tersedia, tetapi belum semua pengelola wisata memilikinya. Sistem *monitoring* keselamatan dan keamanan sudah tersedia tetapi belum menjangkau semua bidang. Kepulauan Seribu belum menerapkan manajemen krisis dan kedaruratan. Promosi destinasi sudah dilakukan secara intensif dan hasilnya berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.

Tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum Kepulauan Seribu sudah melakukan implementasi sesuai kriteria pemanfaatan ekonomi

untuk masyarakat lokal seperti yang terdapat dalam Bab III Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kepulauan Seribu sudah melakukan *monitoring* ekonomi meskipun tidak komprehensif dan hasilnya belum digunakan untuk evaluasi serta belum dipublikasikan secara periodik. Pengelola wisata umumnya sudah memprioritaskan tenaga kerja lokal tetapi belum banyak mempekerjakan kelompok minoritas termasuk penyandang cacat. Perencanaan dan pengembangan wisata selama ini melibatkan masyarakat meskipun tidak semua unsur terwakili. Pengelola wisata sudah melakukan survei-survei kepuasan pengunjung tetapi hasilnya belum digunakan untuk evaluasi serta belum dipublikasikan secara periodik. Akses terhadap masyarakat lokal umumnya terbuka untuk destinasi wisata yang ada di pulau hunian dan cagar budaya, tetapi tidak untuk pulau resor. Program Sapta Pesona dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat sudah dilakukan tetapi belum diketahui dampaknya terhadap pariwisata berkelanjutan. Kepulauan Seribu sudah menerapkan program-program pencegahan, eksplorasi dan komersialisasi perempuan dan anak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengelola wisata umumnya bersedia menerima masukan-masukan dari masyarakat dalam penerapan pariwisata berkelanjutan. Pengelola wisata juga sudah menunjukkan dukungan yang besar dalam bentuk memprioritaskan pembelian dan penggunaan produk-produk usaha

mikro, kecil, dan menengah yang ada di Kepulauan Seribu.

Tabel 3 menunjukkan bahwa secara umum Kepulauan Seribu sudah melakukan implementasi sesuai kriteria pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung seperti yang terdapat dalam Bab III Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pengelola wisata umumnya ingin agar objek-obyek wisata di Kepulauan Seribu terlindungi dengan baik tetapi terkendala dengan pendanaan yang besar. Di pulau-pulau resor dan cagar budaya umumnya kunjungan wisatawan sudah dikelola dengan baik sehingga kecil kemungkinan berdampak negatif terhadap pariwisata berkelanjutan. Demikian juga dengan panduan berkunjung yang umumnya sudah tersedia di pulau-pulau resor dan cagar budaya. Perdagangan benda-benda arkeologis yang ditemukan di Kepulauan Seribu sudah mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pada umumnya semua obyek wisata di Kepulauan Seribu sudah dilengkapi dengan informasi yang relevan dan beberapa juga tersedia dalam beberapa bahasa internasional. Perlindungan kekayaan intelektual mengacu pada kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Tabel 4 menunjukkan bahwa secara umum Kepulauan Seribu belum melakukan implementasi sesuai kriteria pelestarian lingkungan seperti yang terdapat dalam Bab III Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi

Pariwisata Berkelanjutan. Kepulauan Seribu sudah memiliki kebijakan pelestarian lingkungan tetapi penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan tersebut. *Monitoring* lingkungan sensitif umumnya sudah dilakukan di pulau-pulau cagar alam dan hasilnya dievaluasi tetapi *monitoring* di pulau resor dan hunian umumnya belum banyak dilakukan. Perlindungan alam liar juga umumnya sudah dilakukan di pulau-pulau cagar alam. Pengukuran emisi gas kaca tidak dilakukan secara periodik. Pengelola wisata di Kepulauan Seribu umumnya masih sangat tergantung pada penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan air oleh pengelola wisata umumnya belum dilaporkan secara publik. Kepulauan Seribu terutama pulau hunian sering kali mengalami kelangkaan air bersih yang umumnya terjadi di musim kemarau. Kualitas air bersih umumnya baik kecuali untuk pulau-pulau hunian. Umumnya kegiatan-kegiatan wisata di Kepulauan Seribu tidak menimbulkan gangguan cahaya dan suara yang berlebihan. Transportasi di pulau-pulau hunian, resor, dan cagar budaya umumnya didominasi sepeda dan jalan kaki, tetapi untuk transportasi antar pulau masih tergantung pada penggunaan kapal yang berbahan bakar fosil.

## **SIMPULAN**

Kepulauan Seribu di Jakarta mengalam masalah-masalah keterbatasan air bersih, kepadatan penduduk, kurangnya lahan pemakaman, keterbatasan jumlah dermaga, dan banyaknya sampah yang membuatnya keberlanjutannya sebagai salah satu destinasi wisata

alam utama terancam di masa yang akan datang. Keberlanjutannya hanya akan terjamin apabila Kepulauan Seribu mampu menerapkan pariwisata berkelanjutan di berbagai destinasi yang ada di sana. Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang bijak dalam menggunakan dan melestarikan sumber daya untuk mempertahankan kelangsungan jangka panjangnya. Dengan mengacu pada sejumlah kriteria yang ada dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, ditemukan bahwa tidak semua indikator dalam kriteria sudah diimplementasikan di Kepulauan Seribu. Secara umum implementasi yang sesuai adalah yang berkaitan dengan kriteria pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal dan pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung. Sedangkan yang terkait dengan kriteria pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dinilai belum sesuai. Oleh karena itu pemerintah, pengelola wisata, dan penduduk lokal perlu segera melakukan berbagai langkah memperbaiki implementasi pariwisata berkelanjutan agar sesuai dengan kebijakannya. Hal-hal yang perlu diperbaiki terdiri dari strategi destinasi berkelanjutan, *monitoring*, adaptasi terhadap perubahan iklim, inventarisasi aset dan atraksi pariwisata, standar keberlanjutan, manajemen krisis dan kedaruratan, perlindungan warisan budaya, perlindungan kekayaan intelektual, risiko lingkungan, perlindungan lingkungan sensitif, konservasi energi, pengelolaan air, keamanan

air, kualitas air, limbah cair, dan mengurangi limbah padat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, N. Nurlaela, Melia Famiola, M. Rahman Roestan & Zaki Zakaria. (2019). *Evaluating Implementation of a CSR Program for Sustainable Tourism Development in Indonesia: A Case Study of Global Geopark Ciletuh*. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure GCBSS Special Edition.
- Chakrabarty, Bidyut & Prakash Chand, (2012), *Public Administration in a Globalizing World: Theories and Practices*, New Delhi: SAGE Publications India.
- Eber, Shirley (Editor), (1992), *Beyond the Green Horizon: A Discussion Paper Commissioned from Tourism Concern*. Godalming, Surrey: WWF UK.
- <https://kompas.id/baca/metro/2019/06/29/kepulauan-seribu-menuju-nol-sampah>
- <https://metro.tempo.co/read/439327/pak-jokowi-ini-5-masalah-di-kepulauanseribu/full&view=ok>
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Sitepu, Edy Sahputra. (2019). *Improving Tourism Destination Management Through Sustainable Tourism Development Model A Case Study on TSR*. E-Journal of Tourism Vol. 6. No. 2.
- Weaver, David. (2006). *Sustainable*

*Tourism: Theory and Practice*,  
Oxford: Elsevier Butterworth-  
Heinemann.

World Commission on Environment  
and Development. (1987). *Our  
Common Future*.